

Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa Tahun 2017)

Danny Setiawan

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pekalongan

Email: dannysetiawantkj@gmail.com

Abstrak

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan hasil kinerjanya melalui laporan keuangan setiap periode dan mempublikasikannya sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Kualitas informasi dan tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam website pemerintah daerah memerlukan transparansi dari pemerintah daerah dalam pelaporan laporan keuangannya dikarenakan masyarakat memerlukan informasi tersebut agar dapat mengetahui kondisi keuangan masing-masing pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja daerah, umur administratif, kekayaan daerah, pendapatan per kapita, Devt to Service Coverage Ratio (DSCR), pendapatan asli daerah, dan opini audit terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam website pemerintah daerah. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan 30 pemerintah daerah di pulau jawa tahun 2017. Laporan keuangan diperoleh langsung dari website masing-masing pemerintah daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan per kapita terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas pengungkapan. Sedangkan belanja daerah, umur administratif, kekayaan daerah, Devt to Service Coverage Ratio (DSCR), pendapatan asli daerah dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam website pemerintah daerah.

Kata kunci : *Belanja daerah, Umur Administratif, Kekayaan Daerah, Pendapatan per Kapita, DSCR, Pendapatan Asli Daerah, dan Opini Audit*

Abstract

Local governments have an obligation to disclose the results of their performance through financial reports each period and publish them according to the regulations that have been set. The quality of information and the level of disclosure of financial statements on the local government website requires transparency from the local government in reporting their financial statements because the public needs this information in order to know the financial conditions of each local government. This study aims to examine and analyze the influence of regional expenditure, administrative age, regional wealth, per capita income, Devt to Service Coverage Ratio (DSCR), regional original income, and audit opinion on the quality of financial statement disclosures on local government websites. The object of this research is the financial reports of 30 Java's local governments in 2017. Financial reports are obtained directly from the websites of each local government. The analytical method used in this study is multiple linear regression. The results showed that per capita income proved to have a significant negative effect on the quality of disclosure. Whereas regional expenditure, administrative age, regional wealth, Devt to Service Coverage Ratio (DSCR), local revenue and

audit opinion did not significantly influence the quality of financial statement disclosures on the local government website.

Keywords : *Belanja daerah, Umur Administratif, Kekayaan Daerah, Pendapatan per Kapita, DSCR, Pendapatan Asli Daerah, dan Opini Audit*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Salah satu kewajibannya yaitu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Mahsun dkk, 2011:31-32).

Dalam pelaporan keuangan, ada beberapa kepentingan yang harus dipenuhi yaitu, akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*). Transparansi informasi pemerintah mulai menjadi perhatian sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyebutkan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka, serta dapat diakses oleh pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana (Rosita dan Arifin, 2017). Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam riset yang dilakukan di beberapa negara adalah dengan mempublikasikan laporan keuangan di internet (Laswad *et al.*, 2005).

Pemanfaatan *website* sebagai media penyampaian laporan keuangan dan berbagai macam informasi pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri 7A Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Ketiga peraturan tersebut secara implisit telah menyebutkan mengenai pemanfaatan media elektronik untuk pengungkapan informasi kepada masyarakat. Media elektronik yang dimaksudkan dapat merujuk pada *website* yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengungkapan informasi kepada publik (Junaedi, 2015).

Kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah memerlukan transparansi dari pemerintah daerah dalam melaporkan laporan keuangan, karena masyarakat memerlukan informasi tersebut agar dapat mengetahui keuangan masing-masing pemerintah daerah. Hal yang perlu diketahui adalah faktor apa yang mempengaruhi kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut antara lain Belanja Daerah, Umur Administratif, Kekayaan Daerah, Pendapatan per Kapita, *Devt to Service Coverage Ratio* (DSCR), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit.

Menurut Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Sedangkan menurut Siregar, (2015:31) belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan belanja daerah untuk keperluan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di masing-masing daerahnya, salah satunya yaitu pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Dengan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD, seharusnya pemerintah dapat memanfaatkan anggaran tersebut untuk meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan melalui *website* pemerintah daerah. Hasil penelitian Rosita dan Arifin (2017) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Martani (2012) menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

Menurut Rosita dan Arifin, (2017) umur administratif pemerintah daerah adalah tahun dibentuknya suatu pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang pembentukan daerah tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki umur administratif yang lebih lama akan semakin berpengalaman dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan SAP. Hasil penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) dan Lesmana (2010) menunjukkan bahwa umur administratif berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Mandasari (2009) dalam Lesmana (2009) yang menunjukkan bahwa umur administratif tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

Kekayaan daerah adalah sumber daya yang mendukung dari kegiatan operasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kekayaan daerah yang tinggi merupakan indikator kesuksesan suatu pemerintahan dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya, serta kesuksesan dalam hal mengelola keuangan. pemerintah daerah sebaiknya menunjukkan kekayaan daerahnya guna meraih simpati dari masyarakat yaitu dengan melaporkan keuangan daerahnya lewat internet (Hudoyo dan Mahmud, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan Warsidi dkk, (2016) menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Rosita dan Arifin, (2017) menunjukkan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

Menurut Hudoyo dan Mahmud, (2014) Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk disuatu daerah. Banyak sedikitnya jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah pendapatan per kapita suatu daerah. Pendapatan per kapita mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian Styles dan Tennyson, (2007) semakin tinggi pendapatan per kapita daerah maka semakin tinggi pula *political monitoring* oleh masyarakat dan semakin tinggi permintaan informasi pengukuran kinerja pemerintah daerah pada *website*. Oleh karena permintaan tersebut, seharusnya pemerintah dapat meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan

dalam *website* pemerintah daerah karena didalamnya terdapat informasi mengenai kinerja pemerintah daerah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan Hudoyo dan Mahmud, (2014) menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Rosita dan Afirin, (2017) menunjukkan hasil yang bertolak belakang yaitu pendapatan per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

Debt to Service Coverage Ratio (DSCR) merupakan jumlah penerimaan yang tersedia untuk membayar pinjaman dibandingkan dengan jumlah pembayaran pinjaman yang diwajibkan untuk suatu pinjaman. Sebagai contoh, jika kreditur mensyaratkan DSCR sebesar 1.25:1 berarti kreditur menginginkan tersedianya penerimaan sebesar \$1.25 setelah pengeluaran untuk setiap \$1 dari pembayaran pinjaman (Santoso, 2003). Semakin tinggi nilai DSCR maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi hutangnya. Semakin tinggi DSCR mengindikasikan kinerja pemerintahan yang baik karena dapat memaksimalkan penerimaan pemerintah di daerahnya. Dengan kinerja yang baik, maka pemerintah daerah akan menginformasikan kinerja yang baik tersebut kepada masyarakat maupun kreditor melalui pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Sebaliknya semakin rendah nilai DSCR maka semakin rendah pula kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi hutangnya dan akan semakin rendah pula motivasi pemerintah daerah dalam pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah karena nilai DSCR yang rendah dapat mengindikasikan kinerja pemerintah daerah yang rendah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Siregar, 2015:31). Menurut Christiaenssens, (1999) dalam Puspita dan Martani, (2012) menyatakan bahwa Pemerintah yang memiliki PAD yang tinggi akan menunjukkan kepada para stakeholdersnya bahwa pemerintah daerah telah menghasilkan kinerja yang tinggi. Kinerja yang tinggi merupakan sinyal dari manajemen publik yang baik. Hasil penelitian Rudiyanto dan Purwanugraha, (2015) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian Khasanah dan Rahardjo, (2014) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh BPK dengan memeriksa keuangan, kinerja, serta pemeriksaan lain dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan BPK tersebut berupa temuan, opini, kesimpulan, serta dapat pula berbentuk rekomendasi.

2. METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional (*correlational research*). Penelitian korelasional adalah penelitian yang akan menguji keterkaitan antar variabel baik dalam bentuk hubungan maupun pengaruh (Nurhayati, 2012:8). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan menguji keterkaitan antara variabel dependen yaitu kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah dengan variabel independen yaitu belanja daerah, umur administratif, kekayaan daerah, pendapatan per kapita, *Debt to Service Coverage Ratio* (DSCR), pendapatan asli daerah, dan opini audit. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil pengujian mengenai ada atau tidaknya pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi-publikasi dan sudah dikumpulkan oleh orang lain (Nurhayati, 2012:29). Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data tersebut dapat diakses melalui *website* masing-masing pemerintah daerah dan melalui *website* www.bpk.go.id.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, dimana metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara merekam data atau keterangan yang sudah ada dengan menggunakan peralatan elektronik (Nurhayati, 2012:32). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Pulau Jawa. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut : Pemerintah daerah yang memiliki *website* yang dapat diakses secara langsung melalui internet, Pemerintah daerah yang menyediakan Laporan Realisasi APBD pada tahun 2017, Pemerintah daerah yang menyediakan seluruh data-data statistik yang diperlukan untuk seluruh variabel. Dari kriteria sampel diatas terpilih 30 pemerintah daerah di pulau jawa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Metode pengukuran masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Didalam variabel dependen penelitian ini kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah dibagi menjadi dua yaitu kualitas informasi dan tingkat pengungkapan (Rosita dan Arifin, 2017).

Variabel dependen diukur dengan menghitung daftar *scoring indeks* pengungkapan sukarela pada *website* pemerintah daerah dengan menggunakan 12 sub-indeks yang terdiri dari dua indeks yaitu indeks konten dan indeks presentasi. Indeks konten terdiri dari 10 sub-indeks (pembangunan, profil daerah, pelayanan daerah, tokoh daerah, perundangan, pariwisata, kependudukan, keuangan, detail informasi kontak, dan *timeliness*). Sedangkan indeks presentasi terdiri dari dua sub-indeks yaitu *tools* presentasi *website* dan kualitas *website*. Variabel dependen diukur menggunakan rumus sebagai berikut :

TOTAL PRESENTASI = PENJUMLAHAN RATA – RATA INDEKS

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Di dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah :

a. Belanja daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 16 menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diproksikan dengan realisasi belanja yang dilakukan pemerintah daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan dengan menggunakan logaritma natural dari nilai realisasi belanja yang terdapat pada laporan realisasi anggaran pemerintah daerah.

LOG (REALISASI BELANJA)

b. Umur Administratif

Menurut Setyaningrum dan Syafitri, (2012) umur administratif pemerintah daerah adalah tahun dibentuknya suatu pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang pembentukan daerah tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki umur administratif lama akan semakin berpengalaman dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Variabel umur administratif dalam penelitian ini diukur berdasarkan berapa lama berdirinya pemerintah daerah.

Umur Administratif = Tahun Penelitian – Tahun berdirinya pemda

c. Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah adalah sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mempunyai kekayaan yang besar, akan menunjukkan kinerja yang baik atas pengelolaan sumber daya dan potensi daerahnya, serta semakin banyak informasi yang harus diungkapkan atas pertanggungjawaban kekayaan daerah yang besar (Istikomah dan Mutmainah, 2017).

Variabel kekayaan daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan logaritma natural dari nilai total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

LOG (TOTAL ASSET)

d. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk disuatu daerah. Pendapatan per kapita didapat dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita (Hudoyo dan Mahmud, 2014).

Variabel pendaptan per kapita dalam penelitian ini diukur menggunakan rumus sebagai berikut :

$$PpK = \frac{\text{PDRB tahun } t}{\text{Penduduk daerah dalam tahun } t}$$

e. *Debt to Service Coverage Ratio (DSCR)*

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman menunjukkan rasio kemampuan membayar kembali pinjaman yang dikenal dengan istilah *Debt to Service Coverage Ratio* (DSCR).

Variabel *Debt to Service Coverage Ratio* (DSCR) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DSCR = \frac{(PAD + DAU + (DBH - DBHDR)) - BW}{\text{Pokok pinjaman} + \text{Bunga} + \text{BL}}$$

DSCR = *Debt to Service Coverage Ratio* (DSCR);

PAD = Pendapatan Asli Daerah;

DAU = Dana Alokasi Umum;

DBH = Daba Bagi Hasil;

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi;

BW = Belanja Wajib;

Pokok pinjaman = Angsuran Pokok Pinjaman;

Bunga = Beban Bungan Pinjaman;

BL = Biaya Lain.

f. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Mahsun dkk, 2007:39 dalam Rosita dan Arifin, 2017).

Variabel PAD dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$PAD = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total realisasi anggaran pendaptan}}$$

g. Opini Audit

Menurut Junaedi, (2015) Opini audit merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), secara bertingkat opini audit ini terdiri daeri : Tidak Wajat (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Variabel opini audit dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dimana untuk opini audit WTP diberi nilai 1 sedangkan selain opini audit WTP (WDP, TW, dan TMP) diberi nilai 0.

$$\text{Opini Audit} = 1 \text{ untuk WTP, } 0 \text{ untuk WDP, TW, dan TMP}$$

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 20. Ada beberapa tahap untuk melakukan analisis data yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas), uji f dan uji t. Penelitian ini menggunakan persamaan regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh belanja daerah, umur administratif, kekayaan daerah, pendapatan per kapita, DSCR, pendapatan asli daerah, dan opini audit terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam website pemerintah daerah. Model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

a = Konstanta

$b_1b_2b_3b_4b_5b_6b_7$ = Koefisien masing-masing $X_1X_2X_3X_4X_5X_6X_7$

X_1 = Belanja Daerah

X_2 = Umur Administratif

X_3 = Kekayaan Daerah

X_4 = Pendapatan per Kapita

X_5 = *Debt to Service Coverage Ratio* (DSCR)

X_6 = Pendapatan Asli Daerah

X_7 = Opini Audit

e = Standar *error*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan memberikan gambaran tentang data dari masing-masing variabel yang telah diolah dari menggunakan SPSS. Adapun hasil olahan data SPSS dalam bentuk statistik deskriptif akan menampilkan karakteristik sampel yang digunakan di dalam penelitian ini, seperti jumlah sampel, nilai rata-rata, nilai maksimal, nilai minimal dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Dari data yang diolah dengan SPSS, maka hasil dari statistik deskriptif adalah :

Berdasarkan statistik deskriptif diatas, menjelaskan bahwa :

- 1) Variabel kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah (Y) dengan jumlah (n) sebanyak 30 memiliki nilai minimum (terkecil) sebesar 38,98, nilai maksimum (terbesar) sebesar 64,27, dan mean (rata-rata) sebesar 52,3077. Standar deviasi (simpangan baku) variabel ini adalah 6,55424.
- 2) Variabel belanja daerah (X_1) dengan jumlah (n) sebanyak 30 memiliki nilai minimum (terkecil) sebesar 27,55, nilai maksimum (terbesar) sebesar 29,54, dan mean (rata-rata) sebesar 28,3051. Standar deviasi (simpangan baku) variabel ini adalah 0,41768.
- 3) Variabel umur administratif (X_2) dengan jumlah (n) sebanyak 30 memiliki nilai minimum (terkecil) sebesar 18, nilai maksimum (terbesar) sebesar 67, dan mean (rata-rata) sebesar 63,27. Standar deviasi (simpangan baku) variabel ini adalah 11,852.

- 4) Variabel kekayaan daerah (X3) dengan jumlah (n) sebanyak 30 memiliki nilai minimum (terkecil) sebesar 28,34, nilai maksimum (terbesar) sebesar 31,03, dan mean (rata-rata) sebesar 29,0151. Standar deviasi (simpangan baku) variabel ini adalah 0,63068.
- 5) Variabel pendapatan per kapita (X4) dengan jumlah (n) sebanyak 30 memiliki nilai minimum (terkecil) sebesar 16835820,42, nilai maksimum (terbesar) sebesar 114524141,9, dan mean (rata-rata) sebesar 36636895,60. Standar deviasi (simpangan baku) variabel ini adalah 22723475,66.
- 6) Variabel DSCR (X5) dengan jumlah (n) sebanyak 30 memiliki nilai minimum (terkecil) sebesar -1,33, nilai maksimum (terbesar) sebesar 327,45, dan mean (rata-rata) sebesar 46,5860. Standar deviasi (simpangan baku) variabel ini adalah 69,84594.
- 7) Variabel pendapatan asli daerah (X6) dengan jumlah (n) sebanyak 30 memiliki nilai minimum (terkecil) sebesar 0,75, nilai maksimum (terbesar) sebesar 1,03, dan mean (rata-rata) sebesar 0,9337. Standar deviasi (simpangan baku) variabel ini adalah 0,06272.
- 8) Variabel opini audit (X7) dengan jumlah (n) sebanyak 30 memiliki nilai minimum (terkecil) sebesar 0, nilai maksimum (terbesar) sebesar 1, dan mean (rata-rata) sebesar 0,93. Standar deviasi (simpangan baku) variabel ini adalah 0,254.

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan adalah uji regresi untuk menguji hipotesis. Sebelum melakukan uji regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, karena secara teoritis model regresi penelitian ini akan menghasilkan nilai parameter apabila asumsi klasik terpenuhi. Pada penelitian ini dilakukan 3 (tiga) pengujian asumsi klasik, yaitu : multikolinieritas, heterokedastisitas, dan normalitas.

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013:105). Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai *tolerance* > 0,10 atau sama, dengan nilai *VIF* < 10. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam model regresi tidak terdapat *problem* multikolinieritas dan layak digunakan dalam penelitian ini. Karena hasil penelitian menunjukkan semua nilai *VIF* di bawah 10 atau nilai *tolerance* di atas 0,10 berarti tidak terdapat gejala multikolinieritas pada model dalam penelitian ini.

b. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali, (2013:139) uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan yang lain. Cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Park Glejser. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai sig untuk semua variabel > 0.05, hal ini menunjukkan bahwa semua variabel tidak mengandung heteroskedastisitas atau dengan kata lain Homokedastisitas.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan sebuah pengujian untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal

atau tidak. Model regresi yang baik yaitu nilai residunya atau variabel pengganguya berdistribusi secara normal (Ghozali, 2013:160). Salah satu cara untuk mendeteksi variabel pengganggu atau nilai residu berdistribusi normal atau tidak adalah dengan Uji Statistik Non-Parametrik (Kolmogorov-Smirnov). Jika nilai *asym.Sig* (2-tailed) > 0,05 maka data residual berdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai *asym.Sig* (2-tailed) < 0,05 data residual berdistribusi secara tidak normal. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,924 dan lebih besar dari 0,05. Dengan demikian nilai residual terdistribusi secara normal sehingga model penelitian dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS yang telah dilakukan.

Tabel 1
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-125,546		-1,281	,214
	Ln_Belanja_Daerah	7,055	,450	1,216	,237
	Umur Administratif	,073	,132	,715	,482
	Ln_Kekayaan_Daerah	-1,551	-,149	-,377	,710
	Pendapatan per Kapita	-1,767E-007	,000	-,613	-,3292
	DSCR	-,001	-,019	-,051	,959
	Pendapatan Asli Daerah	28,324	,271	1,345	,192
	Opini Audit	-1,512	-,059	-,355	,726

a. Dependent Variable: Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam *Website* Pemerintah Daerah³

Sumber : Data SPSS yang diolah.

Berdasarkan tabel diatas menghasilkan model regresi berikut ini :

$$Y = -125,546 + 7,055X_1 + 0,073X_2 - 1,551X_3 - 1,767E-007X_4 - 0,001X_5 + 28,324X_6 - 1,512X_7 + e$$

Hasil persamaan regresi linier berganda secara statistik dapat diartikan sebagai berikut :

a. Konstanta = - 125,546

Nilai konstanta negatif menunjukkan pengaruh negatif variabel independen (Belanja daerah, umur administratif, kekayaan daerah, pendapatan per kapita, DSCR, pendapatan asli daerah, dan opini audit). Bila variabel independen naik atau berpengaruh satu-satuan, maka akan menurunkan kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah sebesar - 125,546.

b. Nilai besaran koefisien mempunyai nilai beta untuk variabel belanja daerah (X1), umur administratif (X2), dan pendapatan asli daerah (X6), dan opini audit (X7) sebesar 7,055, 0,073, dan 28,324 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketiga variabel berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah (Y). Hal ini menunjukkan apabila ketiga variabel mengalami kenaikan satu-satuan dan variabel lain dianggap tetap maka akan menaikkan kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah sebesar 7,055, 0,073, dan 28,324.

c. Nilai besaran koefisien mempunyai nilai beta untuk variabel kekayaan daerah (X3), pendapatan per kapita (X4), DSCR (X5), dan opini audit (X7) sebesar -1,551, -1,767E-007, -0,001, dan -1,512 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh negatif terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah (Y). Hal ini menunjukkan apabila keempat variabel tersebut mengalami kenaikan satu-satuan dan variabel lain dianggap tetap maka akan menurunkan kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah sebesar -1,551, -1,767E-007, -0,001, dan -1,512.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*), model ini diuji melalui uji statistik t.

a. Hasil Uji Statistik f

Menurut Ghazali, (2013:98) uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengujian sebagai berikut :Jika nilai signifikan $<0,05$ maka hipotesis ditolak yang artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan $>0,05$ maka hipotesis diterima yang artinya semua variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 2
Hasil Uji f
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	564,682	7	80,669	2,606	,040 ^b
	Residual	681,101	22	30,959		
	Total	1245,783	29			

a. Dependent Variable: Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam *Website* Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Opini Audit, Umur Administratif, Pendapatan per Kapita, Pendapatan Asli Daerah, DSCR, Ln_Belanja_Daerah, Ln_Kekayaan_Daerah

Sumber : Data SPSS yang Diolah

Berdasarkan tabel 2, dapat disimpulkan bahwa nilai Sig. $< 0,05$ yang berarti bahwa semua variabel independen (belanja daerah, umur administratif, kekayaan daerah, pendapatan per kapita, DSCR, pendapatan asli daerah dan opini audit) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah).

b. Hasil Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai sig $< 0,05$, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai sig $> 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 3
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-125,546		-1,281	,214
	Ln_Belanja_Daerah	7,055	,450	1,216	,237
	Umur Administratif	,073	,132	,715	,482
	Ln_Kekayaan_Daerah	-1,551	-,149	-,377	,710
	Pendapatan per Kapita	-1,767E-007	-,613	-3,292	,003
	DSCR	-,001	-,010	-,051	,959
	Pendapatan Asli Daerah	28,324	,271	1,345	,192
	Opini Audit	-1,512	-,059	-,355	,726

a. Dependent Variable: Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam *Website* Pemerintah Daerah

Sumber : Data SPSS yang Diolah

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel belanja daerah, umur administratif, kekayaan daerah, DSCR, pendapatan asli daerah, dan opini audit memiliki nilai sig >0,05 yang menunjukkan bahwa keenam variabel diatas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan variabel pendapatan per kapita memiliki nilai sig<0,05 yang menunjukkan bahwa variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pembahasan

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam *Website* Pemerintah Daerah

Menurut Rosita dan Arifin, 2017 belanja daerah digunakan untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas publik yang alokasi anggarannya terdapat dalam APBD tiap tahunnya. Pengadaan infrastruktur dan fasilitas publik yang dilakukan pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Dengan adanya anggaran belanja tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam wesbite pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil uji statistik t, diketahui bahwa variabel belanja daerah memiliki nilai signifikan 0,237 yang berarti lebih besar dari nilai signifikan 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Dari hasil uji statistik t tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki belanja yang tinggi tidak secara otomatis akan melakukan pengungkapan laporan keuangan dalam *website*. Hal tersebut dikarenakan belanja yang tinggi tidak dapat mengindikasikan pelayanan yang tinggi juga sehingga dapat belanja daerah secara otomatis tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Puspita dan Martani (2012) yang mengungkapkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Namun, berbeda

dengan hasil penelitian oleh Rosita dan Arifin (2017) bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

Pengaruh Umur Administratif Terhadap Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam *Website* Pemerintah Daerah

Umur pemerintah daerah dapat diartikan seberapa lama pemerintah daerah ada (Mandasari, 2009 dalam Lesmana, 2010). Secara legal, pembentukan suatu pemerintah daerah ditetapkan dalam suatu undang-undang. Semakin lama keberadaan suatu pemerintah daerah, maka secara pengalaman lebih unggul daripada pemerintah daerah yang masih baru. Begitu juga yang berkaitan dengan sistem administrasi, pemerintah daerah dengan umur yang lebih tua dengan berbagai pengalamannya akan memiliki proses administrasi dan pencatatan yang lebih baik (Lesmana, 2010).

Berdasarkan hasil uji statistik *t*, diketahui bahwa variabel umur administratif memiliki nilai signifikan 0,482 yang berarti lebih besar dari nilai signifikan 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel umur administratif tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lamanya umur administratif suatu pemerintah daerah tidak dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa pemerintahan tersebut memiliki kualitas pengungkapan laporan keuangannya, dikarenakan kualitas pengungkapan laporan keuangan bergantung kepada komitmen pemerintah daerah dalam mentaati peraturan-peraturan yang ada mengenai transparansi dan pengungkapan laporan keuangan. Semakin taat terhadap peraturan yang ada maka diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangannya melalui internet sebagai bentuk pelayanan dan transparansi pemerintah daerah. Jadi umur administratif tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mandasari (2009) dalam Lesmana (2010) bahwa umur administratif tidak berpengaruh dengan kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rosita dan Arifin (2017) dan Setyaningrum dan Syafitri (2012) yang membuktikan bahwa umur administratif berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam *Website* Pemerintah Daerah

Kekayaan daerah merupakan sumber daya yang mendukung dari kegiatan operasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah bisa di kontrol melalui kekayaan yang dimiliki. Keberhasilan suatu pemerintah daerah dapat dilihat dengan tingkat kekayaan daerah yang tinggi (Hudoyo dan Mahmud, 2014). Keberhasilan yang tinggi inilah yang memotivasi pemerintah daerah untuk menginformasikannya kepada masyarakat melalui pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Semakin tinggi kekayaan daerah yang dimiliki suatu pemerintah daerah maka akan meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil uji statistik *t*, diketahui bahwa variabel kekayaan daerah memiliki nilai signifikan sebesar 0,710 yang berarti lebih besar dari signifikan 0,05.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap variabel kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan kekayaan daerah yang tinggi tidak dapat mengindikasikan pelayanan yang baik dan transparansi (pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah). Hal tersebut mungkin dapat disebabkan oleh kurang efisiennya pengelolaan kekayaan daerah yang dimiliki pemerintah daerah sehingga tidak dapat meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rosita dan Arifin (2017) bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Sedangkan hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan Warsidi dkk (2016) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

Pengaruh Pendapatan per Kapita Terhadap Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Banyak sedikitnya jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah pendapatan per kapita suatu daerah. Pendapatan per kapita mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Hudoyo dan Mahmud, 2014).

Berdasarkan hasil uji statistik t, diketahui bahwa variabel pendapatan per kapita memiliki nilai signifikan 0,003 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel pendapatan per kapita berpengaruh terhadap variabel kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Pendapatan per kapita yang tinggi mencerminkan bahwa program-program pemerintah daerah sukses untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di daerahnya. Hal ini selaras dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membuat program-program tersebut berjalan sesuai target. Pendapatan per kapita yang tinggi justru akan menurunkan kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah, karena biaya yang dikeluarkan cukup besar dalam pelaksanaan program-program tersebut. Sehingga pemerintah daerah cenderung untuk tidak mengungkapkan biaya-biaya yang cukup besar tersebut kepada masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hudoyo dan Mahmud (2014) yang menemukan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Rosita dan Arifin (2017) dan Puspita dan Martani (2012) yang menemukan bahwa pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

Pengaruh Debt to Service Coverage Ratio (DSCR) Terhadap Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah

DSCR (*Debt to Service Coverage Ratio*) adalah rasio kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman. Semakin tinggi DSCR maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi hutangnya. Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 7, diketahui bahwa variabel DSCR memiliki nilai signifikan 0,959

yang berarti lebih besar dari nilai signifikan 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel DSCR tidak berpengaruh terhadap variabel kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya rasio DSCR tidak berpengaruh terhadap pengungkapan yang dilakukan pemerintah daerah, karena kualitas pengungkapan tidak hanya bergantung pada besar kecilnya rasio DSCR tetapi pada komitmen pemerintah daerah untuk bersikap transparan kepada masyarakat.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Siregar, 2015:31). Berdasarkan hasil uji statistik t, diketahui bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikan 0,192 yang berarti lebih besar dari nilai signifikan 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah tidak bergantung pada besarnya pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi tidak secara otomatis melakukan pengungkapan dengan konten informasi yang tinggi (Hendriyani dan Tahar, 2015). Karena walaupun pemerintah memiliki pemasukan yang besar dari pengelolaan daerahnya tidak secara otomatis akan mencerminkan pelayanan yang tinggi maupun transparansi suatu pemerintah daerah sehingga tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rosita dan Arifin (2017), Puspita dan Martani (2012) dan Hendrayani dan Tahar (2014) yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Rudyanto dan Purwanugraha (2015) yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

Pengaruh Opini Audit Terhadap Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah

Opini audit adalah pendapatan yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU). Opini audit merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Trisnawati dan Ahmad, 2014).

Berdasarkan hasil uji statistik t, diketahui bahwa variabel opini audit memiliki nilai signifikan 0,726 yang berarti lebih besar dari nilai signifikan 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Hasil tersebut menunjukkan semakin baik atau tidaknya opini audit yang didapat oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Opini apa saja yang didapat pemerintah daerah tidak akan mempengaruhi kualitas pengungkapan yang dilakukan pemerintah, karena melakukan pengungkapan informasi kepada masyarakat merupakan bentuk akuntabilitas dan

transparansi yang merupakan tanggung jawab harus dilakukan oleh pemerintah daerah selaku agen. Jadi baik buruknya opini audit yang didapat, pemerintah akan tetap meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Khasanah dan Raharjo (2014) dan Hendriyana dan Tahar (2015) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh dengan kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Istikomah dan Mutmainah (2017) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh pendapatan per kapita, bahwa pendapatan per kapita (H4) berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah studi empiris pada pemerintah daerah di pulau jawa tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan per kapita yang tinggi mencerminkan bahwa program-program pemerintah daerah sukses untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di daerahnya. Hal ini selaras dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membuat program-program tersebut berjalan sesuai target. Pendapatan per kapita yang tinggi justru akan menurunkan kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah, karena biaya yang dikeluarkan cukup besar dalam pelaksanaan program-program tersebut. Sehingga pemerintah daerah cenderung untuk tidak mengungkapkan biaya-biaya yang cukup besar tersebut kepada masyarakat. Variabel yang lainnya yaitu belanja daerah (H1), umur administratif (H2), kekayaan daerah (H3), DSCR(H5), pendapatan asli daerah (H6), dan opini audit (H7) tidak berpengaruh signifikan atau memiliki hubungan yang berlawanan terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di pulau jawa tahun 2017. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan untuk variabel-variabel tersebut lebih besar dari 0,05. Yang menunjukkan bahwa H1, H2, H3, H5, H6, dan H7 ditolak. Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian yang telah dilakukan mengenai kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah, peneliti memiliki beberapa saran untuk penelitian selanjutnya seperti penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak variabel yang dapat mempengaruhi kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian selain pemerintah daerah di pulau jawa sehingga hasilnya bisa digeneralisasi bagi pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah sebagai bentuk transparansi dan pelayanan kepada masyarakat supaya tidak terjadi asimetri informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Aditya R; Sutaryo dan Budiartanto, Agus. (2013). *Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*.
-

- Hendriyani, Ririn dan Tahar, Afrizal. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol. 22, (No. 1):25-33.
- Hudoyo, Yacoeb T Dan Mahmud, Amir. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 4.
- Istikomah dan Mutmainah, Kurniawati. 2017. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. Vol. 12, (No. 1)
- Junaedi. 2015. Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah, Ketergantungan Daerah, Kompleksitas, Tipe Pemerintah Daerah, Kualitas Audit dan Tingkat Penyimpangan Anggaran terhadap Pengungkapan *Internet-Based Financial Reporting*. *Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta* .Vol. 2, (No. 4)
- Khasanah, Nur L dan Rahardjo, Shiddiq N. 2014. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro journal of Accounting*. Vol. 3, (No. 3);1-11.
- Laswad, Fawzi; Fisher, Richard and Oyelere, Peter. 2005. *Determinan of Voluntary Internet Financial Reporting by Lical Government Authorities*. *Jurnal of Accounting and Public Policy*. Vol. 24;101-121.
- Lesmana, Sigit I. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*. Tesis. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mahsun, Mohammad; Sulistiyowati, Firma dan Purwanugraha, Heribertus A. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Nurhayati, Siti. 2012. *Metode Penelitian Praktis*. Pekalongan: Unikal Press.
- Puspita, Rora dan Martani, Dwi. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam *Website* Pemda. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Rosita, Ladya R.A dan Arifin, Johan. 2017. Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam *Website* Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XX Jember*.
- Rudiyanto, Bartolomeus Dyta Cahya Timor dan Purwanugraha, Heribertus Andre. 2015. Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda terhadap Pengungkapan pada *Website* Pemda. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*. 1-12.

- Rusman, Liswan; Amir, Andi Mattulada dan Fattah, Vita Yanti. 2018. Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu dalam Membiayai Pengeluarannya. *Jurnal Katalogis*. Vol 6, (No. 4);37-47.
- Setyaningrum, Dyah dan Syafitri, Febriyani. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 9, (No. 2);154-170.
- Siregar, Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Trisnawati, Mya Dewi dan Achmad, Komarudin. 2013. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*. Vol.2, (No.2)
- Warsidi; Rizkiyaningsih, Wahyu; Rusmana, Oman dan Sukirman. 2016. *Determinants of Internet Financial reporting in Indonesian Local Governments*. Vol. 01, (No. 01);0-216.
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
-